

Hatibki
...

Ag. 28270/11

(Afd. III A2)
S. d. ...

Spoed.
Hoeta Radja
Pontianak.

RESLUIT.

den 20 October 1911



Gelezen het rapport van den fden
Directeur van Onderwijs en Eeredienat
van 17 October 1911 No. 16997;

INVENTARISASI DAN PENELUSURAN NASKAH KUNO BANTEN (Penelusuran Naskah-Arsip Bangunan-Bangunan Kolonial di Kabupaten/Kota Serang)

Te bepalen en verstaan:
Invoorschrift... 3...
5 October
Tolkoo Bahro...
nomont Atjeh en Onderhoorigheden, en
Oeral Moeschin en Oeral Aboe Bakar,
afkomstig uit de residentie Westerafdee-
ling van Borneo, worden toegelaten, de
eerste twee knapen tot de eerste klasse
en de laatste knapen tot de tweede
klasse van de voorbereidende afdeling
die op het Hoogambt voor Inlandsche
Onderwijs te Serang.

[Extract

REC.
G.A.R.
MIN.
IND.
NOT.
10
O. R.
48392

INVENTARISASI DAN PENELUSURAN NASKAH KUNO BANTEN

[Penelusuran Naskah-Arsip Bangunan-Bangunan Kolonial
di Kabupaten/Kota Serang]



**DINAS BUDAYA DAN PARIWISATA
PROVINSI BANTEN
2012**

INVENTARISASI DAN PENELUSURAN NASKAH KUNO BANTEN

Penelusuran Naskah-Arsip Bangunan Kolonial
di Kabupaten dan Kota Serang

Tahun 2011

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Purbakala,
Museum dan Peninggalan Bawah Air 2012

Penanggung Jawab
Dr. H. Ajak Moeslim, M.Pd

Ketua
Drs. R. Dadie Ruswandi, M.Si.

Sekretaris
Tasrief Adrianto

Anggota
Djajang Subekti, S.Sos.
Nonik Vardjani, S.E.
Dian Rodiani, S.E.
Een Kustini, S.E.

TIM INVENTARISASI DAN PENELUSURAN NASKAH KUNO BANTEN

Ketua
Mufti Ali, Ph.D

Anggota
Dr. Helmy Faizi Bahrul Ulumi, M.Hum
Edi Widodo, M.Hum
Ayatullah Humaeni, M.A.
Ade Jaya Suryani, M.A.
Rohman, M.A.
Yadi Ahyadi, S.Ag
Ade Fakhri Kurniawan, M.Ud.
Mohamad Rifai, S.Pd.I.,M.Si

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
All rights reserved
Copyright© Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten, 2012

Diterbitkan oleh :
Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syekh Nawawi, Palima-Serang Teip/fax. (0254) 267060, 267070



Daftar Isi

Kata Pengantar.....	VII
Inventarisasi dan Penelusuran Naskah Kuno Banten.....	13-18
Bab I Gedung Joang.....	19-21
Mukadimah.....	19
Lokasi dan Kondisi Aktual.....	19
Latar Historis.....	20
Data Sejarah.....	20
Bab II Kantor Gubernur Banten.....	22-27
Mukadimah.....	22
Lokasi dan Kondisi Aktual.....	22
Latar Historis.....	22
Data Sejarah.....	25
Bab III Kantor Bupati Serang.....	29-31
Mukadimah.....	29
Lokasi dan Kondisi Aktual.....	29
Latar Historis.....	29
Data Sejarah.....	30
Bab IV Stasiun Kereta Api Serang,	
Halte Anyer Lor dan Halte Anyer Kidul.....	33-34
Mukadimah.....	33
Lokasi dan Kondisi Aktual.....	33
Data Sejarah.....	33
Halte Anyer Lor dan Anyer Kidul.....	34
Bab V Bendungan Pamarayan.....	35-37
Mukadimah.....	35
Lokasi dan Kondisi Aktual.....	35
Latar Historis.....	35
Bab VI Gedung Mapolres Serang.....	39-44
Mukadimah.....	39
Lokasi dan Kondisi Aktual.....	39
Latar Historis.....	39
Pendirian OSVIA.....	40
Bab VII Gedung Makorem 064 Maulana Yusuf Banten.....	45-50
Mukadimah.....	45
Lokasi dan Kondisi Aktual.....	45
Data Sejarah.....	45
Dinegerikan (1920).....	46
Kesimpulan.....	51
Lampiran.....	53-237
Daftar Pustaka.....	239

INVENTARISASI DAN PENELUSURAN NASKAH KUNO BANTEN

[Penelusuran Naskah-Arsip Bangunan-Bangunan Kolonial
di Kabupaten/Kota Serang]

Pendahuluan

Untuk memahami sejarah bangunan-bangunan kolonial di Kota Serang, terlebih dahulu akan dikemukakan sejarah perkembangan (kota) Serang. Seperti kota lainnya di Jawa, Serang mengalami perubahan tata kota. Ia bertransformasi dari sebuah kampung kecil yang dikenal dengan Kubang Serang pada masa Kesultanan, menjadi daerah konsentrasi militer Pemerintahan Kolonial pada masa peralihan dari VOC ke Pemerintah Kolonial. Serang kemudian tumbuh menjadi sebuah ibukota Keresidenan Banten dengan gedung-gedung megah kolonial yang mengelilingi alun-alun yang terhubung dengan pasar, pusat hiburan, tempat ibadah, penjara, barak militer, lembaga pendidikan, dan lusinan kantor-kantor kedinasan kolonial. Pasca pembangunan rel kereta api pada tahun 1900, yang menghubungkan Serang tidak hanya dengan Batavia tetapi juga kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa, Serang tumbuh menjadi sebuah kota yang dinamis, heterogen dan *extravaganza*. Pada masa ini, Serang menyaksikan berbagai fasilitas infrastrukural yang belum dikenal sebelumnya, seperti gedung bioskop, gedung percetakan surat kabar, kantor penggadaian, hotel, dan pusat perbelanjaan.

Serang pada Masa Kesultanan Banten (1526-1795)

Pada masa Kesultanan, Serang, bukanlah, kota penting. Serang hanyalah sebuah kampung kecil yang dilalui oleh sungai Cibanten, yang dirujuk pada masa Kesultanan, sebagai wilayah penghasil padi. Dalam catatan Babad Banten yang ditulis oleh Sandi Sastra dari informasi Sandi Maya pada akhir abad ke 17 menginformasikan Serang periode kesultanan tahun 1610-1658, sebagai berikut:

Tumenggung Wira Utama, Uworena ing Ponggawi, Isun arep gagaweaan, Sesorangan musim iki, Lan maning isun kardi, Lumbung gede ngalun-alun, Ing kono sandhing pasyar sore, Kalaning kinardi, Doh karengnya tata harja parngandika.

Tumenggung Wira Utama, Umumkan para ponggawa aku mau bekerja, Memeriksa Persawaan saat ini, Dan lagi aku ingin membuat, Lumbung besar di alun-alun, Disana di sebelah Pasar Sore Saat dibuatnya, adalah *doh karengnya tata harja*.¹

Dalam bait yang lain disebutkan:

Kinen syami papatuwen, Para rama dhandhan syami, Kawarna ingkang panggenan, Saserangane narpati, Ing Serang parneh neki, Sawetaning margi agung, Kang kinen atungguwa, Ing Serang aran narpati, Jenengane punika Ki Prenayuda

Semuanya disuruh patuh, Para ayah sibuk bersiap-siap, tersebutlah di tempat [tersebut], persawahan raja, Di Serang tempatnya, Sebelah timur jalan besar, yang disuruh jalan menunggu, Di Serang itu dinamakan raja, Namanya itu adalah Ki Prenayuda.²

¹ Bait ke 5 (Pupuh Sinom yang ke XLVI), Syajarah Banten (DR 625)

² Bait ke 8 (Pupuh Sinom yang ke XLVI), Syajarah Banten (DR 625)

Dalam bait diatas, jelaslah bahwa Serang dirujuk sebagai daerah 'persawahan raja,'³ pertanian padi yang menurut Guillot dikembangkan oleh Abul-Mafakhir.³ Perintah dari Sultan Abul Mafakhir Abdul Kadir kepada mantra Tumenggung Wira Utama untuk membuat lumbung di sawah Sultan di Serang. Bahkan menurut S.B. seperti dikutip Guillot, Sultan Abdul Kadir 'memiliki sawah-sawah di Serang, di sebelah timur jalan besar, dan ia sendiri yang mengawasi sawah-sawah tersebut.'⁴

Kebijakan ini diteruskan oleh putranya, Sultan Ageng Tirtayasa (b. 1651-1683), yang dikenal dengan proyek ekstensifikasi lahan pertanian. Sampai periode ini, Serang tetap dirujuk sebagai areal pertanian padi. Agaknya sampai akhir abad ke-XVIII, Serang tidak berubah statusnya sebagai areal pertanian, penghasil padi, tanah milik para Sultan Banten. Hal ini sejalan dengan pernyataan Atsushi Ota bahwa :

Sawah, wet rice-fields, were located in the area to the south of the capital between Markasana and Kanari and Serang in the mid-eighteenth century. (Sawah terletak di sebelah selatan ibukota [kesultanan] antara Markasana, Kanari dan Serang pada pertengahan abad ke-XVIII).⁵

Serang pada Masa Peralihan Kekuasaan dari VOC ke Pemerintahan Kolonial: 1798-1818

Setelah VOC dibubarkan, Hindia Belanda berada dibawah kekuasaan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, seorang 'patriot' Belanda yang mengabdikan pada tentara revolusi Perancis. Ia mendapatkan perintah dari Raja Louis Napoleon, penguasa Kerajaan Belanda yang baru didirikan, untuk mereorganisasi administrasi pemerintahan kolonial dan menjadikan Jawa sebagai basis pertahanan melawan serangan Inggris yang sudah menguasai Lautan India setelah menaklukkan koloni-koloni Perancis lainnya, seperti Afrika Selatan, Madagaskar, kepulauan Iles de France, Maladewa dan Singapura.⁶



Sketsa Alun-alun Serang 1812.

Pada tahun 1808 Banten ditetapkan oleh Daendels menjadi sebuah prefektur yang ibukota Serang. Dengan demikian Serang menjadi tempat pusat lokasi penyelenggaraan administrasi prefektur disamping menjadi tempat tinggal para *ambtenaar* Belanda dan pegawai Eropa yang bekerja dalam sistem administrasi Pemerintahan Kolonial.⁷

Serang ditetapkan menjadi ibukota Kesultanan adalah ketika Gubernur Jenderal Belanda Daendels pada tanggal 22 Agustus 1810 membagi kesultanan Banten menjadi dua wilayah wilayah dataran tinggi (*the Highlands*) dan dataran rendah (*the Lowlands*). Ibukota di Lowlands Pandeglang ditetapkannya sebagai ibukota wilayah Highlands dan Sultan Saifuddin II, sebagai sultannya). Daendels kemudian menetapkan Serang sebagai ibukota dan mengangkat Pangeran Sura Menggala sebagai sultannya.⁸

³ Guillot, Banten... p. 103.

⁴ Guillot, op.cit., p. 188.

⁵ Ota, Changes of Regime, p. 29.

⁶ Ota, op. cit., p. 143.

⁷ Ota, op. cit. p. 154, 172.

⁸ Ota, op. cit., p.143-4.

Serang Ibukota Keresidenan: Kota Elite dengan Gedung-gedung Megah (1819-1942)

Sebagai ibukota keresidenan Banten, Serang pada zaman kolonial adalah satu-satunya tempat yang paling ramai di Banten. Pada tahun 1846 saja, Serang telah menjadi tempat tinggal bagi lebih dari 200 orang Eropa dan ratusan orang Tionghoa. Beberapa orang dari India, Arab, dan bangsa timur asing lainnya juga dilaporkan telah tinggal di Kota Serang.

Orang Eropa yang tinggal di Serang umumnya adalah para pejabat tinggi yang bekerja di berbagai sektor dan kedinasan di bawah administrasi keresidenan Banten. Serang juga menjadi tempat tinggal bagi keluarga marasose atau polisi militer yang bermarkas di garnisun dekat alun-alun Serang. Disamping itu kota Serang juga ibukota *afdeeling* Serang dan sekaligus juga sebuah *demangschap*. Karena itu Serang menjadi tempat tinggal *inlandsche bestuur ambtenaren* atau pejabat pribumi dari mulai bupati, patih, jaksa, wedana, penghulu kepala, mantri guru, juru tulis, mantri polisi, penilik (*opziener*), dll.

Penduduk *Regentschap* Serang tahun 1920

Distrik	Eropa	Timur Asing	Pribumi
Serang	233	1.206	77.009
Ciruas	10	73	63.149
Pontang	2	687	61.080
Cilegon	17	218	69801
Anyer	15	208	39.986
Pamarayan	1	70	93.078
Ciomas	4	87	53.352
Total	282	2.549	456.455

(sumber: mvo, 1920)

Tujuan dan Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan asal usul bangunan kolonial yang ada di Kota dan Kabupaten Serang. Bangunan-bangunan kolonial dimaksud adalah (1) Gedung Joang 45 (1817), (2) Kantor Gubernur Banten (1822), (3) Kantor Bupati Serang (1829), (4) Stasiun Kereta Api Serang (1900), Anyer Lor (1901) dan Anyer Kidoel (1901) (5) Bendungan Pamarayan (1905), (6) Gedung Mapolres Serang (1908), dan (7) Gedung Korem Maulana Yusuf (1910).

Penelitian saat ini berusaha menjawab dua pertanyaan pokok berikut:

- (1) Kapan gedung dan bangunan kolonial tersebut di atas dibangun?
- (2) Bagaimana proses pembangunan gedung dan bangunan tersebut dilaksanakan?

Pertanyaan-pertanyaan sekunder berikut ini juga akan dicoba diberikan penjelasan:

- (1) Dalam konteks apa bangunan dan gedung tersebut dibuat?
- (2) Individu, Badan atau lembaga apa saja yang terlibat dalam proses pembangunan gedung, bangunan tersebut?

Metode Penelitian dan sumber sejarah

Penelitian yang dilakukan didasarkan pada penelitian sejarah dengan tahapan: (*pertama*) pengumpulan data sejarah atau sering dirujuk dengan tahapan *heuristic*, (*kedua*) menganalisa dan menginterpretasi data sejarah yang dapat dikumpulkan, dan *terakhir* yaitu tahapan historiografi atau merekonstruksi narasi sejarah berdasarkan data-data yang dapat diakses.

Data sejarah yang dirujuk dalam penelitian ini adalah data sezaman (*primary sources*) yang penulis kumpulkan selama tiga bulan di ANRI dan PERPUSNAS. Data-data yang dikumpulkan di ANRI meliputi arsip-arsip dari *Algemeene Secretarie* (Sekretariat Umum)

Pemerintahan Kolonial dari tahun 1817-1942 yang tergolong dalam tipologi dokumen sebagai berikut: (1) *apostillaire dispositie*, (2) *besluit*, (3) *brief algemene secretaris*, (4) *brief gouvernements-secretaris*, (5) *commissoriaal*, (6) *geheim besluit*, (7) *missive gouvernements-secretaris*, (8) *renvooi*, (9) *resolutie*, (10) *rondschriften gouvernements-secretaris*, (11) *telegram algemene secretaris*, dan (12) *verbal algemene secretaris*.

Namun demikian, dokumen arsip yang paling sering dirujuk oleh penulis dalam penelitian ini adalah *Besluit* atau surat keputusan Gubernur Jenderal yang disingkat dalam catatan sumber dengan BT. Dokumen-dokumen arsip tipologi lainnya relatif tidak sering penulis rujuk karena alasan-alasan aksesibilitas data dan sifat dokumen tersebut yang lebih.

Penulis merasa beruntung ketika mengunduh data arsip tersebut diatas, di dalam map arsip tersebut juga dilampirkan data-data pendukung, seperti kalau itu menyangkut *besluit* pembangunan bendungan atau sekolah biasanya ikut dilampirkan laporan direktur *Burgerlijke Openbaar Werken* (BOW, baca PU sekarang) dan surat permohonan dari bupati dan Residen). Bila dalam map *besluit* terlampir dokumen-dokumen dimaksud, maka narasi tentang kegiatan yang dijelaskan dalam *besluit* tersebut akan relatif lebih lengkap dan kontekstual.

Ketika data melimpah seperti yang terkait dengan pembangunan bendungan Pamarayan, pembatasan pembahasan dilakukan karena sifat data-data tersebut yang sangat teknis seperti kebutuhan akan bahan bangunan, jumlah kuli yang diperlukan dan diskusi teknis tentang teknis pembuatan irigasi, siphon, dengan istilah-istilah teknis yang sulit dipahami.

Kemudian untuk melengkapi narasi historis dalam historiografi bangunan-bangunan kolonial di (Kota) Serang, penulis juga mengumpulkan data-data pendukung yang juga bersifat sezaman seperti surat kabar, leaflet, buletin, tabloid dan bahkan dokumentasi foto dan peta. Untuk mendapatkan surat kabar yang meliputi kejadian dan segala peristiwa yang terjadi di Banten penulis mengidentifikasi delapan surat kabar, baik dicetak di Banten seperti *Mimbar Soeara Syarekat Islam* (Serang 1919), *Bantam* (Rangkasbitung 1922), *Pengharapan Bantam* (Rangkasbitung 1924), *De Banten Bode* (Serang 1924-1938), maupun di luar Banten seperti *Tirtajasa* (Bandung 1929-1930), *Soerosowan* (Jakarta 1928-1930), *Pemandangan Umum* (Jakarta (1926-1955)). Semua surat kabar tersebut tersimpan di PERPUSNAS dan dapat diakses relatif lebih mudah, meskipun sebagian besar kertasnya sudah rapuh dengan bagian-bagian halaman yang sudah tidak utuh lagi.

Dokumen foto masa kolonial yang penulis repro dari ANRI juga membantu memberikan ilustrasi gambar yang 'menghidupkan' narasi sejarah. Keberadaan foto meniscayakan keberadaan obyek yang difoto. Dokumentasi foto masa kolonial, jika disandingkan dengan foto bangunan kolonial kondisi sekarang, membantu menggambarkan perubahan bentuk, struktur dan bahkan fungsi bangunan, dalam lintasan sejarah.

Relevansi tersebut juga dikandung dalam peta, sebagai sumber sejarah sezaman. Peta-peta yang dirujuk dalam penelitian ini penulis *copy* dari peta-peta masa kolonial yang disimpan di PERPUSNAS. Peta (Kota) Serang tahun 1926, 1936, 1945 sampai sekarang, misalnya, tersimpan rapih di PERPUSNAS. Urgensi peta tersebut dalam historiografi terlihat dalam fakta bahwa setelah melihat ketiga peta tersebut kita dibantu untuk memahami tidak pertumbuhan pemukiman tetapi juga penambahan jumlah bangunan di Kota Serang.

Sistematika Pembahasan

Diskusi tentang bangunan kolonial di (Kabupaten dan Kota) Serang akan dilakukan secara kronologis, yakni bangunan yang paling awal dibangun akan didiskusikan dimuka, sebaliknya bangunan yang didirikan paling akhir akan mendapatkan narasi paling akhir. Oleh karena itu, sistematika pembahasan yang dilakukan mengikuti pola sebagai berikut:

Diawali dengan pendahuluan. Dalam bagian ini diulas selintas mengenai Serang, sebagai sebuah entitas geografis dan topografis, dalam lintasan sejarah. Seperti apa urgensi dan

relevansi Serang pada masa Kesultanan, Kebertuanan Belanda (VOC), dan pada masa kolonial. Pendirian bangunan di Serang tentu saja sangat berkaitan dengan urgensi dan relevansi Serang, sebagai sebuah ruang dalam tata administrasi dan birokrasi pemerintahan rejim yang menguasainya. Pada masa kesultanan, Serang hanyalah sebagai kampung kecil dan sering dirujuk sebagai wilayah lumbung padi kesultanan. Pada masa VOC, status Serang juga tidak beranjak, i.e. merupakan kampung pinggiran yang tidak diperhitungkan. Baru ketika masa peralihan kekuasaan dari VOC ke Pemerintah Kolonial, Serang menjadi pusat konsentrasi militer, sebagai wilayah penyangga keamanan pulau Jawa. Setelah ditetapkan sebagai ibukota residensi Banten, Serang, pada masa Pemerintahan Kolonial, tumbuh sebagai wilayah tempat dibangunnya bangunan-bangunan pemerintahan serta tempat tinggal para pejabat kolonial, baik dari bangsa Eropa maupun kaum pribumi.

Bab pertama memuat riwayat pembangunan yang sekarang disebut Gedung Joeang 45. Berdasarkan arsip-arsip kolonial yang ada, dalam sejarah pendirian bangunan di (Kota) Serang dapat dikatakan Gedung Joeang 45 merupakan bangunan permanen tertua di Serang. Cikal bakal gedung ini sudah ada sejak tahun 1808, beberapa bulan setelah Daendels menghancurkan Istana Soerosowan. Bab ini akan mendeskripsikan asal-usul pendirian bangunan ini. Diawali dengan pembuatan barak militer (*kazerne*), kemudian dibangun disampingnya rumah komandan dan perwira tinggi dilengkapi dengan kandang yang dapat menampung 40 ekor kuda dan dapur umum. Arsip-arsip kolonial yang penulis berhasil kumpulkan tidak hanya mengenai bahan bangunan dan sumber daya manusia yang mengerjakannya tetapi juga arsip yang memuat rencana pembebasan lahan dan rancang bangunan. Arsip-arsip yang ada juga merekam perkembangan bangunan ini secara struktural, material dan fungsional. Bermula dengan struktur yang menggunakan bambu, dan balok kayu berplester batu dan koral, kemudian ditransformasikan menjadi bangunan *gedong* berbahan batu bata, kapur, dengan struktur besi dan baja. Dalam perjalanan sejarahnya, bangunan ini juga berubah-ubah fungsinya bergantung kepada rejim dan masa pemerintahan siapa yang berkuasa di Banten. Pada masa kolonial awal, ini merupakan tangsi atau barak militer, tempat tinggal bagi 200 orang personil militer lebih. Pada masa kolonial periode kemudian, ia menjadi pusat komando militer wilayah Banten. Pada masa Jepang, gedung ini menjadi markas Kenpetai. Pada masa kemerdekaan dan revolusi fisik, menjadi markas BKR, kemudian TNI dan sekarang digunakan sebagai gedung veteran.

Bab dua mendiskusikan sejarah pembangunan gedung yang sekarang sering dirujuk dengan Pendopo Gubernur. Cerita rakyat yang berkembang sering menjelaskan kepada kita bahwa bahan bangunan yang dipakai adalah sisa material bangunan Istana Surosovan yang dihancurkan. Sebaliknya, arsip-arsip kolonial yang ada menyatakan bahwa material bangunan sebagian besar didatangkan dari Batavia dibeli dari dana yang dikumpulkan dari tender 32 pengusaha Tionghoa. Dari bangunan kolonial yang ada di Banten, selain dari Bendungan Pamarayan, Pendopo Gubernur memakan biaya paling banyak.

Dalam **bab tiga** penulis mengulas sejarah pembangunan kantor Bupati Serang yang juga sering disebut dalam sejarah lisan bahwa bahan bangunannya diangkut dari bekas bangunan Istana Surosovan. Pembangunan kantor bupati dimulai pada tahun 1829, beberapa tahun dibangunnya kantor residen. Sama seperti kantor gubernur, kantor bupati juga materialnya didatangkan dari Batavia. Hanya saja karena ukurannya lebih kecil biaya yang dibutuhkan dan lama waktu pengerjaannya lebih singkat.

Bab empat memuat diskusi penulis terkait dengan sejarah pembangunan Stasiun Kereta Api Serang, Anyer Lor dan Anyer Kidul, yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah pembangunan jalan kereta api Batavia-Rangkasbitung-Serang antara tahun 1890-1905. Pembangunan jalur yang telah membuka isolasi penduduk Banten dari dunia luar ini ternyata menjadi *terminus* awal dimulainya pembangunan Bendungan Pamarayan, yang kebutuhan

ribuan ton batunya diangkut dari Anyer Kidul ke Stasiun Catang menggunakan jalur kereta api.

Bab lima mengulas pembangunan bendungan terbesar di Banten yang dalam arsip kolonial dirujuk dengan *prise d'eau* Pamarayan. Pembangunan bendungan ini dimulai setelah jalur kereta api yang menghubungkan Rangkasbitung Anyer Kidul selesai dibangun tahun 1905. Bab ini mengulas tidak hanya biaya yang dibutuhkan tetapi juga sumber daya manusia dan tenggat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan *stuwdam* ini. Termasuk yang dibahas disini adalah pembangunan saluran induk kiri dan kanan, yang berhasil mengubah tanah tidak produktif menjadi sawah 'tarikan' yang mampu menyediakan kebutuhan beras wilayah Banten sejak tahun 1925.

Bab enam mengulas sejarah pendirian gedung yang dipakai oleh Polres Serang, yang dulu dikenal dengan OSVIA, Sekolah Calon Praja Pribumi, yang dibangun tahun 1908. Sekolah 'Kaum Menak' ini harus tutup karena penghematan anggaran besar-besaran yang dilakukan pemerintah colonial pada tahun 1927. Pada perkembangannya kemudian bekas bangunan sekolah ini dipakai oleh *Normaal School*. Menjelang kemerdekaan kemudian dipakai oleh kepolisian sebagai markas komandonya.

Pada bab tujuh penulis merekam sejarah pembangunan bangunan yang sekarang dipakai sebagai markas KOREM 064 Maulana Yusuf. Bangunan ini semula didirikan untuk tempat berlangsungnya *normaal school*, sekolah calon guru, pada tahun 1910. Dalam bab ini diulas mengenai aktivitas *normaal school* dan kiprah para alumninya. Sekolah yang tutup tahun 1928 ini kemudian gedungnya dipakai sebagai gedung Regentschap Raad (DPRD masa colonial) Kabupaten Serang. Pasca kemerdekaan kemudian dialihfungsikan menjadi markas komando TKR BKR dan kemudian setelah masa Agresi Belanda ke-I dan II menjadi markas TNIAD.

Akhir pembahasan ditutup dengan **kesimpulan**, yang meringkas ide pokok dari setiap bab. Untuk melengkapi data dan ilustrasi narasi, dibagian akhir dilampirkan arsip-arsip kolonial dalam berbagai jenis dokumen arsip dalam koleksi umum arsip *algemeene secretarie*.

Bab I

Gedung Joeang 45

Mukadimah

Berdasarkan arsip-arsip kolonial yang ada, dalam sejarah pendirian bangunan di (Kota) Serang dapat dikatakan Gedung Joeang 45 merupakan bangunan permanen tertua di Serang. Cikal bakal gedung ini sudah ada sejak tahun 1808, beberapa bulan setelah Daendels menghancurkan Istana Soerosowan. Bahkan Du Puy, seorang perwira utusan Daendels yang dibunuh Sultan Banten, disebut-sebut bermarkas di daerah yang kemudian menjadi tempat dibangunnya Gedung Joeang ini. Bab ini akan mendeskripsikan asal-usul pendirian bangunan ini. Diawali dengan pembuatan barak militer (*kazerne*), kemudian dibangun disampingnya rumah komandan dan perwira tinggi dilengkapi dengan kandang yang dapat menampung 40 ekor kuda dan dapur umum. Arsip-arsip kolonial yang penulis berhasil kumpulkan tidak hanya mengenai bahan bangunan dan sumber daya manusia yang mengerjakannya tetapi juga arsip yang memuat rencana pembebasan lahan dan rancang bangunan. Arsip-arsip yang ada juga merekam perkembangan bangunan ini secara struktural, material dan fungsional. Bermula dengan struktur yang menggunakan bambu, dan balok kayu berplester batu, kemudian ditransformasikan menjadi bangunan *gedong* berbahan batu bata, kapur, dengan struktur besi dan baja. Dalam perjalanan sejarahnya, bangunan ini juga berubah-ubah fungsinya bergantung kepada rejim dan masa pemerintahan siapa yang berkuasa di Banten. Pada masa kolonial awal, tempat ini merupakan tangsi atau barak militer, tempat tinggal bagi 200 orang personel militer lebih. Pada masa kolonial periode kemudian, ia menjadi pusat komando militer wilayah Banten. Pada masa Jepang, gedung ini menjadi markas Kenpetai. Pada masa kemerdekaan dan revolusi fisik, menjadi markas BKR, kemudian TNI dan sekarang digunakan sebagai gedung veteran.

Lokasi dan Kondisi Aktual

Gedung Joang 45 berada di sebelah selatan alun-alun kota Serang, tepatnya di jalan Ki Mas Jong, Kota Serang. Gedung yang pernah dipakai sebagai markas Kempetai ini dulunya terdiri dari tiga gedung besar dengan halaman yang luas dan pepohonan besar di sekitarnya. Kedua bangunan yang lainnya kini digunakan sebagai kantor Didokes Polda Banten dan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Serang. Sementara yang masih menunjukkan keaslian bangunannya hanyalah yang sekarang dijadikan sebagai kantor Dewan Harian Daerah Pejuang 45 atau dikenal sebagai Gedung Joang 45.

Gedung Joang 45 sekarang dipakai sebagai pusat kegiatan dari berbagai organisasi yaitu:

1. DHD 45 (Dewan Harian Daerah 45)
2. FPB (Front Pemuda Banten)
3. Yapeta (Yayasan Pembela Tanah Air)
4. BKR (Badan Keamanan Rakyat)
5. Repmas (Relawan Perbaikan Nasib Masyarakat)
6. CSBS (Center for Study Banten Strategies)
7. YGJB (Yayasan Gedung Joang Banten)
8. GPPeta (Generasi Penerus Pembela Tanah Air)
9. YBKBN (Yayasan Bhinneka Krida Bela Negara)
10. PBKBN (Pemuda Bhinneka Krida Bela Negara)
11. Satkar Ulama (Satuan Karya Ulama Indonesia)
12. CPPW 45 (Catur Panca Pejuang Wirawati 45)
13. SPMI (Serikat Pekerja Maritim Indonesia)

Latar Historis

Periode peralihan kekuasaan dari VOC ke Pemerintah Kolonial telah membawa dampak perubahan besar dalam sistem birokrasi pemerintahan. Perubahan itu tidak hanya berdampak pada restrukturisasi kekuasaan tradisional orang Eropa di Hindia Belanda tetapi juga telah mengubah relasi politik, ekonomi, sosial dan perdagangan antara bangsa Eropa dengan para elite kesultanan dan kerajaan di Nusantara.

Relasi politik yang dibangun tersebut masih sedemikian rentan. Kas Pemerintahan Kolonial, akibat kebangkrutan VOC, masih kosong. Stabilitas politik tanah jajahan masih dalam tingkat yang memerlukan perhatian prioritas. Sistem pemerintahan yang baru, yang menjadi bagian dari sistem pemerintahan Kerajaan Belanda, masih kekurangan sumber daya. Belum lagi penaklukan Kerajaan Belanda oleh Perancis memaksa Pemerintahan Kolonial Belanda mengadopsi sistem birokrasi pemerintahan Perancis yang menandai diperkenalkannya sistem birokrasi modern. Masa *interregnum* (peralihan kekuasaan) dari Pemerintah Hindia Belanda ke Inggris (1813-1816) juga menyisakan pengaruh yang sedemikian besar pada konsep-konsep pengaturan dan manajemen kekuasaan di Hindia Belanda.

Peralihan kekuasaan dan perubahan birokrasi pemerintahan tersebut tentu saja berdampak kepada pembangunan infrastruktur di tanah jajahan, termasuk di Banten. Dalam arsip kolonial yang berhasil dikumpulkan di ANRI, didapatkan kesan bahwa pada awal Pemerintahan Kolonial (1808-1818), Serang menyaksikan pembangunan bangunan-bangunan permanen untuk personil militer. Barak atau tangsi militer (*kazerne*), rumah dan istal kuda komandan militer, rumah sakit militer, sekolah dan lapangan untuk latihan militer, serta pengerasan jalan untuk kepentingan mobilisasi militer, serta berbagai fasilitas dan perlengkapan kebutuhan sehari-hari para personil militer yang bertugas di Banten.

Dalam surat May Jen. J.M. Troepen ke Gubernur Jenderal tertanggal 22 Juni 1819 dijelaskan bahwa bangunan-bangunan militer yang ada di Serang terdiri dari:

1. Satu blok rumah yang dapat menampung 200 tentara dengan kondisi yang baik
2. Sebuah bangunan rumah sakit yang dapat menampung 60 orang sakit, dilengkapi dengan apotik, tempat tinggal untuk para suster, gudang, dapur, rumah penyembuhan, dan desprines (ruang ...)
3. Kandang kuda yang terbuat dari bambu, dapat menampung 40 kuda
4. Rumah untuk pejabat tinggi yang terbuat dari batu bata dan dalam kondisi bagus
5. Rumah kapten
6. Dua blok tempat tinggal opir militer berpangkat letnan, terbuat dari bambu dan dengan lantai dipleser batu
7. Rumah untuk seorang inspektur (*opzichter*).⁹

Hanya baru pada arsip-arsip tahun 1818, penulis menemukan beberapa informasi mengenai pembangunan rumah tempat tinggal residen, asisten residen, bupati dan wakil bupati yang semuanya berlokasi di (Kota) Serang sekarang.¹⁰

Data Sejarah

Gedung Joang 45 dulunya adalah merupakan tangsi militer di Serang. Pembangunan tangsi militer ini berdasarkan usul Letnan Jenderal Anthing kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang tertuang dalam suratnya tanggal 29 Agustus 1818 yang berisi perlunya mem-

⁹ BT 22-06-1819, no. 13.

¹⁰ BT 11-02-1819, no. 2; BT 13-04-1819, no. 9; BT 31-08-1816, no. 12; BT 07-07-1818, no. 7; BT 10-09-1822, no. 7; BT 05-03-1819, no. 8.



bangun tangsi militer karena yang sudah ada kondisinya sudah rusak. Pembangunan tangsi militer diperlukan karena pada saat itu masih sering terjadi kekacauan atau pemberontakan akibat adanya ketidakpuasan orang-orang Banten setelah dihancurkannya Keraton Surosowan Banten.

Tangsi militer yang dibangun terdiri atas gedung utama, rumah perwira, barak militer untuk prajurit, dapur, kandang kuda, dan poliklinik. Tangsi militer ini dibuat dari bahan-bahan yang tahan lama seperti kayu jati, genting, rotan, dan konstruksi tembok yang menggunakan besi.

Pada masa pendudukan Jepang gedung ini pernah dijadikan sebagai markas Kenpetai, kemudian diambil alih oleh Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang dibentuk oleh KH. Syam'un setelah berhasil merebut dan mengusir tentara Jepang melalui sebuah pertempuran hebat pada tanggal 10 Oktober 1945. Dahulu markas Kenpetai yang terletak di selatan alun-alun Serang ini terdiri atas tiga gedung besar dengan halaman yang luas dan pepohonan besar di sekitarnya.

Bab II

Kantor Gubernur Banten

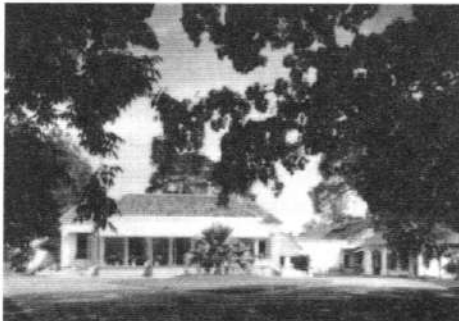
Mukadimah

Bangunan yang dapat dijadikan *landmark* kota Serang ini riwayat pendiriannya simpang siur. Cerita lisan yang berkembang member kita informasi miris bahwa material dan struktur bangunannya sebagian besar diambil dari reruntuhan Istana Surosowan yang dihancurkan Daendels tanggal 20 November 1808. Sebaliknya arsip-arsip kolonial yang tersimpan di ANRI menyatakan bahwa material bangunan sebagian besar didatangkan dari Batavia dibeli dari dana yang dikumpulkan dari tender 32 pengusaha Tionghoa. Dalam bab ini akan dikemukakan sejarah pembangunan kantor dan sekaligus rumah tinggal residen ini.

Lokasi dan Kondisi Aktual

Kantor Gubernur Banten berada di jalan Brigjen K.H. Sam'un no 5 Serang, yang merupakan jalan utama kota Serang. Gedung ini menghadap ke timur dan berseberangan dengan sisi barat alun-alun kota Serang. Kantor ini terdiri dari beberapa gedung lama dan beberapa gedung baru. Gedung lama yang dimaksud adalah gedung utama yang menjadi kantor dan sekaligus rumah tinggal gubernur. Kantor asda, biro hokum, biro umm dan keuangan, kantor humas dan gedung PKK. Gedung baru yang dimaksud adalah bangunan lama yang sudah berubah bentuknya, seperti aula SETDA, biro kesra, biro organisasi dan kepegawaian, dan biro perlengkapan.

Latar Historis



Pada tahun 1596, orang-orang Belanda dengan armadanya yang terdiri atas empat buah kapal dagang tiba di Banten untuk tujuan mengambil dan membeli rempah-rempah. Karena terdorong untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan persaingan dagang dengan orang-orang Spanyol dan Portugis, maka pada tahun 1603 didirikanlah kantor dagang VOC di Banten yang merupakan kantor dagang VOC pertama di seluruh kepulauan Indonesia di bawah pimpinan Francois Wittert, tujuannya adalah untuk memonopoli perdagangan di Banten. Namun sikap tegas Sultan Banten memaksa kantor tersebut untuk dipindahkan ke Jayakarta pada tahun 1611. Dari sinilah kekuasaan VOC berkembang dengan melakukan penetrasi terhadap perekonomian maupun politik di Pulau Jawa, hingga pada akhirnya dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 (Kartodirdjo, 1975:64-70).

Kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintah Kerajaan Belanda dengan membentuk pemerintahan Hindia Belanda di Nusantara. Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang pertama adalah H.W.Daendels (1808 – 1811). Pada tanggal 1 Januari ia mendarat di Anyer dan pada

tanggal 5 Januari 1808 memutuskan Jayakarta menjadi pusat pemerintahan dengan nama Batavia.

Peralihan ini membuat sistem pemerintahan yang berbeda dari sebelumnya dan secara administrasi melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Melalui sistem yang baru, Daendels ingin menjalankan pemerintahan secara langsung. Daendels melakukan birokratisasi di kalangan pemerintahan tradisional, para sultan dan bupati dijadikan pegawai pemerintah dan menerima gaji (Lubis, 2003: 88).

Ketika terjadi perubahan politik, situasi Kesultanan Banten dalam keadaan lemah. Di saat bersamaan, Sultan Abunasar Muhammad Ishak Zainul Muttaqin tetap tidak mengakui kekuasaan Daendels. Puncak ketegangan antara Sultan Banten dan Daendels terjadi pada tanggal 21 November 1808, ketika seorang utusan Daendels yang dikirim ke Keraton Surosowan, Philip Pieter Du Puy, dibunuh di depan pintu gerbang keraton tersebut. Kejadian ini dibalas oleh Daendels dengan menyerang Keraton Surosowan pada hari itu juga. Keraton Surosowan berhasil dikuasai Daendels, Sultan Banten ditangkap dan ditahan di Batavia, kemudian diasingkan ke Ambon.

Untuk menjalankan roda pemerintahan, Daendels mengangkat putra pangeran Ratu Aliyuddin sebagai sultan dengan gelar Sultan Abunasar Mufakir Muhammad Aliyuddin II (1808 – 1810) atau biasa dipanggil Sultan Aliyuddin II. Berdasarkan instruksi Gubernur Jenderal Daendels tanggal 27 November 1808, Sultan Banten diharuskan untuk setia, taat, dan mematuhi segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda (Lubis, 2003: 93). Berdasarkan hal itu, Sultan Banten dijadikan pegawai pemerintah kolonial. Hal ini menimbulkan perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Ahmad, putra Sultan Aliyuddin II (Michrob dan Chudari, 1993:175). Perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Pangeran Ahmad menimbulkan kecurigaan bagi Daendels bahwa Sultan Banten berada di belakang itu semua. Oleh karena itu Sultan Banten ditangkap dan dipenjara di Batavia. Benteng dan Keraton Surosowan dihancurkan dan dibakar. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1808 (Lubis, 2003:94).

Untuk melemahkan perlawanan rakyat, Daendels kemudian membagi wilayah Banten menjadi tiga daerah, masing-masing setingkat dengan kabupaten, yaitu Banten Hulu, Banten Hilir dan Anyer, dan ditempatkan dibawah pengawasan *prefek* yang berkedudukan di Serang. Sultan Muhammad Syafiudin (1809 – 1813), putra Sultan Zainul Shalihin diangkat pemerintah kolonial sebagai pengganti Sultan Aliyuddin II dan kepadanya diserahkan daerah Banten Hulu (Selatan). Pada masa pemerintahan Sultan Syafiudin pusat pemerintahan dipindahkan dari Keraton Surosowan ke Keraton Kaibon, karena Surosowan sudah hancur (Lubis, 2003: 94).

Daendels digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Willem Jansen, namun Jansen tidak mampu menghadapi serbuan armada Inggris ke Pulau Jawa yang terjadi pada Agustus 1811. Akibatnya Belanda menyerah kepada pihak Inggris dan menetapkan Thomas Stamford Raffles sebagai pejabat penguasa Pulau Jawa pada tahun 1811. Beberapa istilah administrasi struktural mengalami perubahan, seperti *prefektur* diganti menjadi karesidenan, dan jabatan *prefek* diganti menjadi residen. Dibentuk jabatan struktural baru, yaitu asisten residen dan wedana yang mengepalai distrik.

Kesultanan Banten pada saat itu di bawah kekuasaan Sultan Muhammad Syafiuddin. Akan tetapi, kondisi wilayah Banten jauh dari ketenteraman sehingga pada tanggal 19 Maret 1813 Raffles mendatangi istana Sultan untuk membuat sebuah perjanjian. Raffles memaksa Sultan Muhammad Syafiuddin untuk menyerahkan pemerintahan Banten kepada pemerintahan Inggris. Status Sultan diubah menjadi 'bupati sultan' dan mendapat tunjangan dari pemerintah Inggris sebesar 10.000 ringgit setahun (Michrob dan Chudari, 1983:176). Dengan tindakan Raffles ini maka berakhirilah eksistensi Kesultanan Banten. Seluruh daerah Banten telah dikuasai oleh pemerintah Inggris dan dijadikan sebagai sebuah karesidenan.

Sultan menjadi aparat pemerintah Inggris dengan status sebagai Bupati yang berada di bawah Residen. Hak serta kekuasaannya dibatasi.

Data Sejarah

Kantor Gubernur Banten dulunya adalah Kantor Residen Banten. Kantor residen di Serang dibangun berdasarkan surat usulan Residen Banten kepada Gubernur Hindia Belanda tanggal 26 Januari 1821 yang menyatakan perlunya dibangun kantor residen di Banten karena pada saat itu belum ada tempat yang representatif untuk kantor seorang Residen di Banten. Perencanaan pembangunan kantor residen diusulkan oleh Direktur bangunan Sipil Hindia Belanda tanggal 31 Agustus 1821 nomor 56 di mana disebutkan tentang rencana tata letak, bentuk, serta biaya yang diperlukan untuk membangun kantor Residen di Serang. Surat usulan tersebut kemudian disetujui oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang tertuang dalam surat keputusannya tanggal 10 September 1822 nomor 7. Surat keputusan tersebut berisi persetujuan atas usul pembangunan kantor Residen baik mengenai letak, bentuk, dan biaya yang diperlukan sebesar f 55.752.23. Biaya pembangunan kantor ini sebagian dibebankan kepada Residen Banten sebesar f 21.868 (*Besluit* tanggal 31 Agustus 1822 nomor 86).

Melihat arsip surat yang ditandatangani oleh Direktur BOW tanggal 17 Agustus 1822, dapat disimpulkan bahwa biaya pembangunan kantor dan rumah residen ini tidak diambil dari kas Pemerintah Kolonial, melainkan dikumpulkan dari proses tender yang ditawarkan oleh Direktur BOW kepada 32 pengusaha Tionghoa yang diminta untuk memberikan pinjaman dana dengan jumlah yang bervariasi antara fl. 3.000 sampai fl. 31.000.¹¹

Pembangunan gedung ini dirancang oleh arsitek Horst, sedangkan ketua pelaksanaannya adalah Letnan Haas dibawah pengawasan Komisaris Borneo Fabius yang saat itu menjabat sebagai Residen Banten. Bahan-bahan bangunan sebagian didatangkan dari Batavia, sebagian lagi berasal dari Serang, sedangkan pintu dan jendela berasal dari bangunan yang sebelumnya telah ada di Banten dan Anyer. Gedung ini terdiri atas bangunan utama, rumah tinggal, dapur, rumah-rumah pembantu, beranda depan, ruang makan, ruang sidang, dan ruang penginapan. Dalam perkembangannya, gedung ini menjadi kantor sekaligus kediaman Residen sampai masa pemerintahan Hindia Belanda berakhir. Pada masa pemerintahan Jepang, gedung ini dipergunakan sebagai pusat pemerintahan Jepang di Banten. Setelah kemerdekaan Indonesia, gedung ini kembali menjadi kantor Residen Banten dan Inspektur Wilayah Banten di Jawa Barat sampai akhirnya menjadi kantor Gubernur Banten setelah diresmikan menjadi propinsi sejak tanggal 4 Oktober 2000.

Residen Banten pada masa Belanda yang pernah berkantor dan tinggal di Gedung ini:

1. J. De Bruijn W.D.	1817-1818
2. C. Van Wit	1818-1819
3. J. De Puij	1819-1819
4. Mr.J.H. Pebias	1819-1821
5. P. Van De Poel	1821-1822
6. A. Abrahami De Mulerde	1822-1827
7. E.H. Smulders	1827-1835
8. J.H.R. T.L. Herra Siccama	1835-1839
9. J.H.R. C.F. Golman	1839-1843
10. D.A. Bruijn	1843-1851
11. G.A.R. Wiggers	1851-1855

¹¹ BT 10-09-1822, no. 7 dan dok. Lampiranrya.

12. C.P. Brest Van Kempen	1855-1857
13. C.F. De Laneij	1857-1862
14. O. Van Pelanen Petal	1862-1865
15. J.H. Van Der Palm	1865-1872
16. B. Van Baak	1872-1874
17. F.E.P. Van Der Bosch	1874-1877
18. W.F. Van Andel	1877-1878
19. Mr. J.P. Metman	1878-1881
20. A.J. Span	1881-1884
21. E.A. Engger Brecht	1884-1888
22. J.A. Pelders	1888-1892
23. B.H.H. Bavenhaaij	1892-1893
24. J.A. Pelders	1893-1895
25. J.A. Hardeman	1895-1906
26. F.R. Oferddiwijn	1906-1911
27. C.W.A. van Rinsun	1911-1913
28. H.L.C.B. Fleulon	1913-1916
29. Bijleveld	1916-1918
30. W.C. Thime	1918-1920
31. C. Came	1920-1921
32. J.C. Bedding	1921-1925
33. De Vries	1925-1925
34. F.G. Putman Cramer	1925-1931
35. J.C. Kanter	1931-1933
36. A.M. Van Der Flast	1933-1937
37. J.R. van de Buesekom	1937-1941
38. Mr. W.H. Courts	1941-1942

Pembantu Gubernur Masa Pemerintahan Jepang:

39. Letkol Onokuchi Sjuutyokan	1941-1942
40. Kolonel Orio	1942-1943
41. Watanabe Hirosji	1943-1944
42. Ban Jokyjosji	1944-1945

Pasca Kemerdekaan:

43. Mas Tirtasujatna	29 September – 6 Oktober 1945
44. KH. Tb. Ahmad Chatib	1945 – 1950

Masa Agresi Belanda I – II:

45. N. Makkers	1948-1949
46. Azikin Nataatmadja	1949 – 1949

Masa Setelah Pemerintahan RI Kembali:

47. Tb. Bakri	1949-1951
48. R. Basarah Adiwinata	1952-1955
49. R. Achjad Penna	1955-1957
50. R. Abdullah	1957-1960
51. R.M. Nur Atmadibrata	1960-1966
52. Tb. Hasan Sutawinangun	1966-1973

Inspektur Wilayah Banten:

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 53. H.S. Ronggowaluyo | 1973-1976 |
| 54. Drs. H. Kartiwa Suriasaputra | 1976-1983 |
| 55. Drs. Mahfud | 1983-1987 |
| 56. Drs. H. Muhammad Samsudin | 1987-1994 |
| 57. H.Momon Gandasmita | 1994-2000 |
| 58. Drs. H. Diding Kurniadi, M.Si. | April-November 2000 |

Gubernur Banten:

- | | |
|------------------------------|-----------|
| 59. Drs. H. Hakamudin Djamal | 2000-2001 |
| 60. Dr. H. Joko Munandar | 2001-2005 |
| 61. Rt. Atut Chosiah, S.E. | 2006- |

(sumber: Nina H. Lubis, Banten dalam Pergumulan Sejarah, 243-244)

Daftar Pustaka

- Anonim, *Kereta Api Indonesia* (Departemen Penerangan Republik Indonesia)
- Ali, Mufti, *Banten dan Pembaratan: Sekolah Masa Kolonial: 1833-1942* (Serang: Lab. Bantenologi, 2012)
- Atsushi, Ota, *Changes of Regimes and Social Dynamics in West Java. Society, State and the Outer World of Banten 1750-1830* (Leiden-Boston: E.J. Brill, 2006)
- Guillot, Claude, *Banten. Sejarah dan Peradaban Abad X-XVII* (Jakarta: KPG, 2008)
- Herlina, Lina, *Fungsi Bendungan Pamarayan Terhadap Peningkatan Ekonomi Petani di Banten tahun 1905-1945* (skripsi IAIN 'Sultan Maulana Hasanudin', 2007)
- Kartodirdjo, Sartono et. al., *Sejarah Nasional Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975) jilid. III
- Lubis, H. Nina, *Banten Dalam Pergumulan Sejarah. Sultan, Ulama, Jawara* (Jakarta: LP3ES, 2004)
- Ongkosongo, Otto S.R., *Telaah Cagar Rekayasa Hidrologi Pamarayan* (Serang: Menara Banten, 2004)
- Memori Serah Jabatan 1921-1930* (Jawa Barat) (Jakarta: ANRI, 1976)
- Memori Serah Jabatan 1931-1940* (Jawa Barat (I) (Jakarta: ANRI, 1980)
- Memoar Pangeran Aria Ahmad Djajadiningrat* (Jakarta: Paguyuban Keturunan P.A.A. Djajadiningrat, 1996)
- Michrob, Halwani & Mujahid Chudori, *Catatan Masa Lalu Banten* (Serang: Penerbit Saudara, 1996)
- 'Staatsspoorwegen in Nederlandsch Indie', *Verslag over het Jaar 1939* (Batavia) deel I
- Widodo, Edi, *Gedung-gedung Bersejarah: Kajian Arkeologi di Kota Serang* (Tesis Pasca Sarjana UI, 2007)

Manuskrip:

Sjadjarah Banten Besar (DR 625)

Koran:

Banten Bode	1925-1938
Soerosowan	1929
Tirtajasa	1930
Bantam	1922
Pangharepan Bantam	1924

Arsip *Algemeene Secretarie* koleksi ANRI:

BT 22-06-1819, no. 13; BT 11-02-1819, no. 2; BT 13-04-1819, no. 9; BT 31-08-1818, no. 12; BT 07-07-1818, no. 7; BT 10-09-1822, no. 7; BT 05-03-1819, no. 8; BT 10-09-1822, no. 7; MGS, 26-11-1908, no. 3388; BT 5-9-1919, no. 29; BT 29-8-1910, no. 13; BT 29-8-1910, no. 14; BT 20-10-2011, no. 31; BT 20-10-1915, no. 10; BT 28-3-1912, no. 4; BT 4-6-1913, no. 13; BT 8-11-1913, no. 33; BT 17-12-1913, no. 3; BT 17-12-1914, no. 19; DvJ, 12-12-1914, no. 19513; BT 30-3-1922, no. 9; MGS 28-10-1914, no. 2555; BT 29-8-1919, no. 20; BT 27-7-1916, no. 67; BT 24-1-1921, no. 8; BT 14-7-1915, no. 15; BT 16-5-1918, no. 9; Cl 1923 no. 5767; BT 12-1-1905, no. 11; Bijlage BOW 14-1-1905, lampiran pada BT 22-01-11905 no. 11; BT 22-01-1905, no. 11; BT 10-08-1905, no. 13; BT 28-04-1906, no. 18; BT 24-10-1906, no. 12; BT 08-07-1907, no. 29.; BT 26-03-1909, no. 13; BT 15-05-1909, no. 17; Bijlage Dir. BOW pada BT 19-11-1910, no. 6; BT 07-09-1907, no. 26; BT, 26-06-1907, no. 30; BT 01-04-1903, no. 58; BT 16-06-1820, no. 14; BT 16-09-1818, no. 11; BT 07-04-1818, no. 3; BT 09-02-1900, no. 17; BT 24-01-1900, no. 12.

Ontvangen by de Afdeeling
den Redacties
Algemeen door
Geresumeerd door

N^o 1/A.1.

Ag. 31083/12

Mⁱⁿ

aan
het Departement der Burgerlijke
Opbouw Kecken.

Worst beleeft verrocht aan de
Algemeene Secretarie te willen
mededeelen wanneer het antwoord
kan worden tegemoetgezien op de
onderhandsoche nota van 6 Desember
1912 N^o 116 A.2 betreffende het
in het, aan de Inlandsche school-
commissie te Serang gericht
schrijven van den f^t Directeur
der Opleidingsschool aldaar van
21 April 1912 N^o 12 genoemd be-
drag van f 42.- door den Water-
staat voor de maanden Maart
en April 1912 aan genoemden
f^t Directeur uitgekeerd om het
verder in orde brengen van het erf
en het onderhorid van de gebouwen
met het erf, aan de afdoening
van welke aangelegenheid werd
herinnerd bij onderhandsoche nota
van 10 Desember 1912 N^o 128 A.2.

NE
G

Algemeene Secretarie.



Op last.
Afdeling III A.2.

H.

Januari 1913.

51